

**PENGARUH AUDIT KINERJA DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
TERHADAP GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE
(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Siak)**

Oleh :

Muhammad Irfan

Pembimbing : Nur Azlina dan Rusli

Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

Email : irfan93muhammad@gmail.com

*The Influence Of Audit Performance And Internal Control System To Good
Government Governance
(Empirical Study On Local Work Unit Districs Siak)*

ABSTRACT

This research is to determine the effect of the performance audit and internal control system of good government governance. Population in this research are civil servants in 28 work units siak district. While respondents consisted of a head of department, chief financial subdivision planning and financial planning staff totaling 68 people. The sampling method used in this research is purposive sampling, while data processing method used in this research is multiple regression analysis using SPSS software for data processing 21. The conclusion are that the performance audit and internal control system significant effect on good government governance. Furthermore the determination test which adjusted R^2 of 0,754 or 75,4% indicates that the performance audit and internal control system affecting the good government governance. While the remaining 24,6% is influenced by other variables.

Keyword : audit performance, internal control system, good government governance

PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik dalam hal ini pemerintah mengalami perubahan pada sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi mendorong perlunya perbaikan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan berorientasi sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah

di Indonesia sendiri dilakukan setelah dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menegaskan kewenangan Pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi. Dan diperbaharui oleh UU No. 12 tahun 2008, lahirlah *local government* (pemerintah daerah yang diberi kewenangan untuk mengurus kepentingan daerahnya).

Keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dilandasi perilaku yang berkarakteristik tertentu sesuai prinsip-prinsip *good governance*. Mardiasmo (2004:25) mengemukakan bahwa, penyelenggaraan suatu negara yang mengimplementasikan *good governance* berarti penyelenggaraan negara tersebut mendasarkan diri pada prinsip-prinsip partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap atau responsivitas, berorientasi pada konsensus, berkeadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis dan saling keterkaitan.

Good governance dapat menciptakan laporan keuangan pemerintah berkualitas dan menekankan pada proses pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta keterlibatan stakeholders baik bidang sosial, ekonomi maupun politik serta pendayaan sumber daya yang ada, manusia atau pun keuangan yang dilaksanakan menurut keperluan masing-masing. Sehingga diadakannya pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan agar pengelolaan keuangan rakyat yang dipegang oleh pemerintah dilakukan dengan transparan baik dari proses penyusunan hingga pertanggungjawaban sehingga akan terciptanya akuntabilitas didalam pengelolaannya. Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien adalah salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik (Salam, 2004:19).

Persoalan ketidakpatuhan berdampak pada kerugian Negara paling besar disumbangkan oleh Pemerintah Provinsi Riau dan

kemudian diikuti oleh pemerintah Kabupaten/Kota lainnya yang salah satunya menyumbangkan kerugaian terhadap Negara adalah kabupaten Siak sebesar Rp. 56,6 M. Banyaknya temuan BPK menandakan bahwa lemahnya kinerja pemerintah daerah dalam tata kelola keuangan. Untuk Kab.Siak dengan 10 temuan, Atas dasar temuan BPK terhadap pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kab/Kota se- Riau, BPK RI tetap memberikan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sehingga atas rekomendasi yang diberikan seakan tidak menjadi catatan buruk terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan opini atas LKPD kabupaten siak mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun BPK juga menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu (1) penyajian piutang daerah belum berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dan (2) pengelolaan asset tetap pemerintah belum memadai. BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan Negara, yaitu (1) dasar hukum penyertaan modal pemerintah pada BUMD belum didukung dengan peraturan daerah dan (2) terdapat kekurangan penerimaan dari pajak penerangan jalan.

Terhadap pemerintah daerah berdampak merugikan Negara, beberapa persoalan menjadi temuan BPK seperti; kegiatan pemerintah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan/fiktif, kelebihan bayar pada setiap kegiatan, kekurangan volume atas pengerjaan

fisik, sisa kegiatan terlambat disetorkan, kegiatan yang belum dipertanggungjawabkan, potensi penerimaan yang tidak dibuat payung hukum dan bantuan hibah secara berturut-turut dalam 3 tahunan. Akan tetapi, sampai saat ini atas kesalahan tersebut belum dilakukan perbaikan oleh pemerintah daerah, tampak pada postur anggaran tahun 2015 yang hampir sama dengan tahun sebelumnya, sangat berpotensi mengalami kerugian Negara. (Sumber: diolah dari LHP BPK)

Adanya permasalahan dalam kinerja SKPD Siak menjadi persoalan yang perlu dicermati dalam penerapan tata kelola pemerintahan. Menyoroti terkait persoalan pelayanan publik yang diberikan oleh sebagian besar SKPD terhadap masyarakat yang selama ini masih kurang maksimal. Terutama yang terkait pengenaan tariff dan waktu penyelesaian dokumen pelayanan public yang berorientasi rakyat. Serta menyoroti pelaksanaan Peraturan Daerah tentang tenaga kerja tempatan, masih banyak perusahaan mengutamakan tenaga kerja dari luar daerah, sehingga menutup peluang kerja masyarakat lokal. Dan juga persoalan fungsi terminal di beberapa kecamatan tidak maksimal. Terminal baru, kecamatan tualang tak berfungsi optimal, padahal APBD yang digunakan dalam pembuatan terminal cukup besar. Serta kinerja SKPD yang lamban dalam menjalankan program dikarenakan realisasi fisiknya masih dibawah 20% dan realisasi keuangan dibawah 10%. Dan persoalan besar yang perlu dicermati ialah mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan, salah satunya sering terjadi di daerah siak. Persoalan ini

menggambarkan masih lemahnya kinerja beberapa SKPD.

Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik *good governance* yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Untuk menilai sejauh mana pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam melayani kepentingan masyarakat, maka perlu dilakukan audit kinerja. Audit kinerja merupakan pengujian sistematis, terorganisir, dan objektif atas suatu entitas untuk menilai suatu pemanfaatan sumber daya alam, memberikan pelayanan publik secara efisien dan efektif dalam memenuhi harapan stakeholder dan memberikan rekomendasi guna peningkatan kinerja.

Keberhasilan penerapan GGG juga tidak terlepas dari peran pengendalian internal yang baik dan mampu memenuhi kebutuhan stakeholders serta menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Internal kontrol dalam sebuah organisasi. Menurut Coso Report (2008) pengendalian internal adalah mencakup rencana organisasi dan semua metode serta tindakan yang telah digunakan dalam perusahaan untuk mengamankan aktivitasnya, mengecek kecermatan dan keandalan dari data akuntansinya, memajukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan pimpinan.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah (1) apakah audit kinerja berpengaruh terhadap *good government governance*. (2) apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap *good government governance*.

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk membuktikan pengaruh

audit kinerja terhadap good government governance. (2) untuk membuktikan pengaruh sistem pengendalian intern terhadap good government governance

TINJAUAN PUSTAKA

Good Government governance

Menurut Peraturan Pemerintah Negara pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009, *Good Government Governance* adalah konsep pengelolaan pemerintahan yang menekankan pada pelibatan unsur pemerintah, masyarakat dan swasta secara proporsional sebagai tiga pilar utama. Konsep inilah yang member garis dasar bahwa siapapun yang berperan dan peran apapun yang dijalankan dalam penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk lebih berorientasi ke pelayanan publik yang semakin baik.

Prinsip-prinsip Good Government Governance

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, terdiri dari:

- a. Profesionalitas
Berkaitan dengan peningkatan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintah agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.
- b. Akuntabilitas
Berkaitan dengan peningkatan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi
Berkaitan dengan penciptaan kepercayaan timbal balik antara

pemerintah dan masyarakat melalui penyedia informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

- d. Pelayanan prima
Berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan public yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
- e. Demokrasi dan partisipasi
Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung.
- f. Efisiensi dan efektifitas
Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab.
- g. Supremasi hukum
Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Audit Kinerja

Audit kinerja merupakan langkah yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja suatu entitas. Pengertian audit kinerja menurut Indra Bastian (2007:47) adalah pemeriksaan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program pemerintah yang diaudit.

Jenis audit kinerja

Menurut Mahmudi (2007;192) audit kinerja mencakup ekonomi, efisiensi dan program. Berikut masing-masing jenis audit kinerja tersebut:

1. Audit ekonomi dan efisiensi
2. Audit program

Penelitian yang terkait dengan faktor-faktor terciptanya *good governance* salah satunya pernah dilakukan oleh Dr. Leny Nofianti (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pada dimensi audit kinerja atau audit operasional variabel pelaksanaan audit internal sektor publik yang diteliti, menunjukkan bahwa pelaksanaan audit kinerja/operasional masih harus ditingkatkan hampir di semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Provinsi Riau. Hasil yang diperoleh pada pelaksanaan audit kinerja/operasional bukan semata-mata kebenaran formal tapi adalah manfaatnya untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan akuntabilitas publik dalam kerangka mewujudkan *good governance*. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis berikut:

H₁: Audit Kinerja Berpengaruh Terhadap *Good Government Governance*

Sistem Pengendalian Intern

Menurut PP No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk member keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektifitas, efisiensi, ketaatan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Komponen Pengendalian Intern

Menurut PP nomor 60 tahun 2008 pengendalian internal terdiri dari lima komponen yang saling terkait, yang terdiri sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. pemantauan

Sukmaningrum (2012) mengemukakan bahwa, sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan mencapai berbagai tujuan yang luas. Dengan demikian, pengendalian intern merupakan pondasi *good governance* dan garis pertama dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan LKPD. Sehingga pengendalian intern pemerintah berhubungan dengan *good governance*.

Atas dasar penjelasan di atas, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Terhadap *Good Government Governance*.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:80). Populasi dalam penelitian ini dilakukan pada seluruh SKPD Kabupaten Siak.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh popuasi tersebut

(Sugiyono, 2012:81). Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling Method*. Menurut Sugiyono (2012:68), purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dari peneliti. Sampel pada penelitian ini adalah Kepala SKPD atau Sekretaris, Kepala SubBagian Keuangan dan Staf Subbagian Keuangan pada Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten Siak.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui pengelolaan kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada responden dan kemudian akan diambil sesuai waktu yang ditentukan.

Definisi Operasional Variabel Variabel Dependen

Menurut world bank dalam mardiasmo (2009;17), good governance adalah cara yang digunakan dalam mengelola sumberdaya ekonomi dan social untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Governance dapat diartikan sebagai proses dari suatu pengambilan keputusan dan proses bagaimana keputusan tersebut diimplementasikan (Sari, 2013).

Pengukuran variabel good government governance dilakukan melalui 4 indikator penelitian. Dalam penelitian ini, pernyataan yang diteliti merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013) dan susitianingsih (2010).

Variabel independen

Audit kinerja

Pasal 4 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara, pengertian audit kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan Negara yang terdiri atas audit aspek ekonomi dan efidensi serta audit aspek efektifitas.

Pengukuran variabel audit kinerja dilakukan melalui 3 indikator penelitian. Pernyataan yang diteliti merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Kristianto (2012).

Sistem Pengendalian Intern

Dalam PP No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamatan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengukuran variabel sistem pengendalian interen dilakukan melalui 5 indikator penelitian. Pernyataan yang diteliti merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Saptapradipta (2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Responden

Responden dalam penelitian ini berjumlah 84 orang dari 28 SKPD yang masing-masing SKPD ada 3 responden.

Tabel 1
Distribusi Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	84	100%
Kuesioner yang kembali	68	81%
Kuesioner yang tidak kembali	16	19%
Kuesioner yang dapat diolah	68	81%

Sumber : Data Olahan, 2017

Kuesioner yang disebar berjumlah 84 buah (100%), sedangkan jumlah kuisisioner yang dapat diolah adalah 68 buah (81%). Kuesioner yang tidak kembali terjadi karena adanya beberapa responden yang tidak sempat mengisi kuesioner dengan alasan waktu dan kesibukan.

Hasil Uji Kualitas Data Hasil Uji Validitas

Dilihat dari uji validitas data didapatkan bahwa nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua item pernyataan untuk variabel audit kinerja, sistem pengendalian intern dan good government governance adalah valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian ini dilakukan untuk menghitung koefisien *Cronbach alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Seluruh variabel yaitu variabel audit kinerja, sistem pengendalian intern dan good government governance lebih besar dari 0,60 sehingga dikatakan reliabel.

Hasil Uji Normalitas

Nilai $\text{assympt sig kolmogrov-smirnov (K-S)}$ lebih besar dari 5% (0.05). dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi secara normal.

Hasil Uji Multikolinearilitas

Tabel 2
Hasil Multikolinearilitas Data

	Collinearity statistic	
	Tolerance	VIF
Audit Kinerja	.421	2.378
Sistem pengendalian intern	.421	2.378

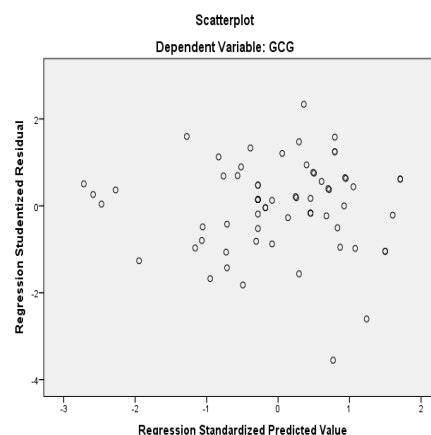
Sumber : Data Olahan, 2017

Bahwa keseluruhan nilai tolerance yang dihasilkan dalam penelitian ini berada diantara 0.1 – 1.0 dan nilai VIF diantara 1.0 – 10 dengan demikian dapat dijustifikasi bahwa keseluruhan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian terbebas dari asumsi multikolinearilitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-studentized.

Gambar 1
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Olahan, 2017

Dari grafik scatterplot diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta penyebarannya terletak diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2013;110).

Tabel 3
Hasil Uji Autokorelasi

Nilai Durbin-Watson	Keterangan
1.629	Tidak terjadi Autokorelasi

Sumber : Data Olahan, 2017

Dari hasil pengujian autokorelasi menunjukkan nilai durbin watson terletak antara -2 dan 2 = $-2 < 1.629 < 2$. Dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan nya autokorelasi dalam model regresi penelitian ini.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Tabel 4
Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized coefficient	t	Sign
	B	Std Error	Beta		
Constant	5.070	3.080		1.646	.105
Audit Kinerja	.627	.137	.428	4.586	0.000

Sistem Pengendalian Intern	.561	.104	.501	5.369	0.000
----------------------------	------	------	------	-------	-------

Sumber : Data Olahan, 2017

Persamaan regresi linear bergandanya adalah sebagai berikut

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 5.070 + 0.627X_1 + 0.561X_2 + e$$

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Untuk menguji pengaruh audit kinerja terhadap good government governance digunakan uji statistic t. Uji statistik t bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan t hitung dengan t tabel serta melihat nilai signifikannya. Dimana t hitung $> t$ tabel dan p value $< \alpha = 0.05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dan sebaliknya jika t hitung $< t$ tabel dan p value $> \alpha = 0.05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak

Dari tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa t hitung $> t$ tabel yaitu $4.586 > 1.997$ dengan nilai signifikansi diperoleh adalah $0.00 < 0.05$. Hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa dengan adanya good government governance dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal maka diperlukan audit kinerja yang memadai, karena audit kinerja merupakan suatu proses pemeriksaan yang dilakukan kepada pemerintah terhadap berbagai program kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku dimana hasilnya dikomunikasikan kepada pihak pengguna laporan tersebut.

Hasil penelitian ini mendukung dengan yang dilakukan oleh Rahmawati (2014), penelitian

ini menunjukkan bahwa audit kinerja berpengaruh signifikan terhadap *good corporate governance*.

Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern terhadap *good government governance* digunakan uji statistik t bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan t hitung dengan t tabel serta melihat nilai signifikannya. Dimana t hitung > t tabel dan p value < $\alpha = 0.05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dan sebaliknya jika t hitung < t tabel dan p value > $\alpha = 0.05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Dari tabel 4 diatas terlihat bahwa t hitung > t tabel yaitu $5.369 > 1.997$ dengan nilai signifikan diperoleh sebesar $0.00 < 0.05$. Hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa dengan adanya sistem pengendalian intern yang berjalan maksimal maka tata kelola pemerintahan yang baik akan tercapai. Hal ini disebabkan karena tujuan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai agar tercapainya kegiatan yang efektif dan efisien.

Hasil ini mendukung dengan yang dilakukan oleh Ristianti, Sinarwati dan Sujana (2014) penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap *good governance*. Dan juga penelitian Yusniyar, Darwanis, Syukriy Abdullah (2015) Penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap *good governance* dan kualitas laporan keuangan. Sedangkan hasil penelitian ini

berbeda dengan Ruspina (2013), penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh terhadap *good government governance*.

Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2013;67). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.873 ^a	.762	.754

Sumber : Data Olahan, 2017

Adjusted R Square sebesar 0.754 atau 75,4% ini menunjukkan bahwa *good government governance* daerah SKPD kabupaten siak dapat dipengaruhi oleh factor audit kinerja dan sistem pengendalian intern sebesar 75,4%. Sedangkan sisanya sebesar 24,6% dipengaruhi oleh factor-faktor yang tidak diamati dalam penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menemukan bahwa audit kinerja berpengaruh terhadap *good government*

governance. Dengan adanya good government governance dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal maka diperlukan audit kinerja yang memadai, jadi dilakukannya audit kinerja ini, dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh pemerintah dalam pelaksanaan program yang telah dilakukan.

2. Hasil pengujian hipotesis kedua menemukan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap good government governance. Dengan adanya sistem pengendalian intern yang berjalan maksimal maka tata kelola pemerintahan yang baik akan tercapai. Hal ini disebabkan karena tujuan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai agar tercapainya kegiatan yang efektif dan efisien.

Saran

1. Bagi pemerintah daerah kabupaten siak dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan
2. Bagi peneliti selanjutnya:
 - a. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan supaya dapat lebih mengembangkan dan memperluas lingkup penelitian sehingga dapat lebih mengungkapkan fenomena yang terjadi di pemerintahan dalam tata kelola pemerintahan baik.
 - b. Penelitian selanjutnya dapat mengganti objek penelitian kelengkapan yang lebih luas

yang berbeda karakteristiknya.

- c. Dapat juga menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A.A., R.J Elder, & M.S. Beasley. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance*. Alih Bahasa Herman Wibowo. Jakarta: Erlangga.
- Akbar, Alfin Gustian. 2013. *Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STEI) Ekuitas. Bandung.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Boynton, William C., Raymond N. Johnson dan Walter G. Kell. 2006, *Modern Auditing*. 8th Edition. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Devfi, Agustina. 2008. "Pengaruh Budaya Perusahaan dan Pengendalian Intern Terhadap Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance." Skripsi UNP.
- Depi Oktia Ruspina, 2013, *Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Interna Pemerintah (Spip) Terhadap*

- Penerapan Good Governance (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kota Padang), Jurnal Universitas Negeri Padang, Padang.
- Ghazali, Imam, 2012-2013, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Cetakan Keempat, Semarang, Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kristianto, Yudi. 2011. Pengaruh Aksesibilitas laporan Keuangan dan Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi pada Pemerintah Kota Bandung). *Skripsi*. Universitas Komputer Indonesia. Bandung.
- Kesuma, Eka, Putrianti 2014. Pengaruh Audit Internal dan Kepemimpinan yang Efektif dalam upaya mewujudkan Good Corporate Governance. Studi Pada SKPD Pemerintah Kota Pekanbaru.
- Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik Edisi 2. Yogyakarta: Andi.
- Nugroho, Fibrianto Wahyu. 2005. Prosedur Pelaksanaan audit Kinerja Pada BUMN/BUMD Di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah. *Skripsi*. Universitas Semarang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
- Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- Rusmini. 2013. Kinerja Pegawai Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Di Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir. *Skripsi* Universitas Mulawarman. Medan.
- Ristanti, Ni Made Asih., Ni Kadek Sinarwati dan Edy Sujana. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Komitmen Organisasi terhadap Penerapan Good Governance (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Tabanan). *e-Journal Program Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1): 2-14.
- Rahayu, Cici. 2011. Pengaruh Audit Kinerja Sektor Publik dan Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Cimahi. *Skripsi*. Universitas Komputer Indonesia. Bandung.
- Rahmawati., Andika Rusli. 2014. Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* pada Kabupaten Luwu. *Jurnal Equilibrium*. Vol. 04 No. 02.

- Suratmi, Ni Made., Nyoman Trisna Herawati, dan Nyoman Ari Surya Darmawan. 2014. Pengaruh Audit Kinerja, Penyajian Laporan Keuangan, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Publik. E-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Sari, Diana. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyelesaian Temuan Audit terhadap Penerapan Prinsip Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Penelitian Pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat dan Banten). Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado, 25-28 September.
- Sujana, Edy, 2014, Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan), Jurnal, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali.
- UNDP. 2007. Governance for Sustainable Development: A Policy Document. New York: UNDP.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- <http://www.pekanbaru.bpk.go.id>